

## **ABSTRAK**

### **Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian**

Anindito Rizki Wiraputra

Upaya pembuktian kejahatan transnasional khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menitikberatkan pada unsur eksploitasi dalam pembuktiannya. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu variabel yang rawan atas TPPO. Penerapan Undang-Undang dalam rangka mencegah terjadinya TPPO terkendala dalam pemenuhan barang bukti, sehingga pasal 89 pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu pada unsur preventif dan represif untuk melakukan penundaan dan penolakan keberangkatan karena dugaan terjadinya TPPO. Pendekatan normatif empiris dalam penelitian digunakan untuk dapat menganalisa penerapan aturan di lapangan dan kendala-kendala yang muncul, khususnya dalam upaya pencegahan TPPO. Dalam pembahasan penelitian ini, ditemukan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum tidak memiliki dasar yang cukup kuat, karena belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur dengan adil proses bekerja di luar negeri. Adanya area abu-abu dalam aturan hukum menimbulkan celah untuk dapat terjadinya TPPO. Aparat penegak hukum saat ini hanya dapat melakukan upaya pencegahan dengan metode profiling dan observasi yang bersifat subjektif. Sehingga upaya pencegahan TPPO hanya dapat dilakukan sebelum calon TKI berangkat ke luar negeri. Maka pembentukan aturan yang jelas dalam standardisasi persyaratan untuk bekerja di luar negeri serta proses edukasi terhadap para calon tenaga kerja merupakan unsur penting dalam upaya pencegahan TPPO dengan subjek TKI di Indonesia.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Keimigrasian, Tenaga Kerja Indonesia

## **ABSTRACT**

### ***Crime of Trafficking in Person with the Subject of Indonesian Workers in the Perspective of Immigration Law***

*Anindito Rizki Wiraputra*

*The efforts to prove transnational crimes, especially the Crime of Trafficking in Persons (TIP), emphasize the element of exploitation in the proof. Indonesian Workers (TKI) are one of the variables that are vulnerable to TIP. The application of the Law in order to prevent the occurrence of TIP is constrained in the fulfillment of evidence, so that article 89 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration is a preventive and repressive element to postpone and reject departures due to the alleged occurrence of TIP. The empirical normative approach in research is used to be able to analyze the application of rules in the field and the obstacles that arise, especially in efforts to prevent TIP. In the discussion of this research, it is found that the approach that can be taken by law enforcers does not have a strong enough basis, because there are no clear provisions that clearly regulate the process of working abroad. The existence of gray areas in legal regulations creates a loophole for TIP. Currently, law enforcement officials can only take preventive measures by using subjective profiling and observation methods. So that efforts to prevent TIP can only be carried out before prospective workers leave the country. So the formation of clear rules in standardizing the requirements for working abroad and the educational process for prospective workers are important elements in efforts to prevent TIP with the subject of TKI in Indonesia*

*Key Words: Transnational Crime, Immigration, Indonesian Worker*